

PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN DASAR

Ahmad Sholeh

Staf Pengajar pada PGMI Fakultas Tarbiyah UIN Malang

Abstract

The empowering in primary education includes all of the aspects which aim to improve the quality of education either in teaching-learning process, curriculum, management or others. If we observe primary education especially in state primary education, we will find some weaknesses. Therefore to solve the problem, we must implement the planning of community-based education and decentralization of education from grass root optimally. Because the results of the analyzing showed that the implementations of planning have significance to survive the institution for the future.

Keyword: *Empowering, community-based education, grass root*

A. Pendahuluan

Dalam sector pendidikan, tuntutan reformasi terus saja bergulir seiring dengan arus reformasi di sector-sektor lainnya. Salah satu isu reformasi pendidikan yang masih terus dibahas adalah reformasi di pendidikan dasar (SD/MI). Hal ini di karenakan masih banyaknya kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang ada dalam pendidikan dasar kita. Khusus pada sekolah dasar negeri, pada saat ini realita menyatakan bahwa siswa yang ada pada sekolah dasar negeri (SDN) semakin lama semakin menurun. Lain halnya dengan sekolah-sekolah swasta yang semakin meningkat siswanya Hal ini sesuai hasil temuan *Pokja Pendidikan Berbasis Masyarakat* BAPPENAS/Bank Dunia yang diketuai oleh Dr. Hafid Abbas antara tahun 1998-1999 yang menyatakan bahwa di Kalimantan Selatan terdapat sebuah sekolah, yaitu SDN Teluk Keramat, Kecamatan Paringing, Hulu Sungai Utara hanya mempunyai 6 siswa, masing-masing seorang siswa di setiap kelas. Di sekolah itu, terdapat 3 guru dan 1 kelapa sekolah. Sekolah ini mempunyai 6 ruang kelas dengan kondisi yang baik konstruksinya. Sekitar 1 kilometer dari sekolah itu, ada 2 SD Negeri lainnya denan kondisi agak berbeda: SDN Naluban Utara memiliki 12 siswa denan guru tetap 5 orang dan SDN kalahiang mempunyai 50 siswa dengan 5 orang guru dan 1 orang kepala sekolah. Keadaan ini berbeda sekali dengan kondisi madrasah setempat. MIN Teluk Keramat memiliki 94 siswa dan MIS Darus Salam, Tanah Laut, mempunyai 435 siswa dengan 2 guru umum. (Jalal & Supriyadi 2001;205)

Kalau boleh penulis cermati sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi kelemahan Sekolah Dasar Negeri yang merupakan bentuk sekolah pemerintah sehingga mengakibatkan merosotnya siswa yang ada dan meningkatkan sekolah swasta :

Pertama, institusi-institusi pemerintah yang mengelola pendidikan dasar sangat kurang terkoordinasi, yaitu antara Depdiknas dan Depag dalam meletakkan sekolah-sekolah yang ada. Sehingga mengakibatkan adanya 2 institusi pendidikan dasar di satu daerah. Hal ini disebabkan adanya pola perencanaan *top-down* yang sering kali kurang menyentuh kebutuhan masyarakat yang spesifik. Akibatnya kurang adanya dukungan masyarakat terhadap SD Negeri tersebut. Dan untuk sekolah swasta yang ada perencanaannya dari *grass root*.

Kedua, manajemen pada SD Negeri kebanyakan kurang efektif dan kurang kemampuan kepala sekolah dalam mengelola pendidikan dasar tersebut. Terutama dalam hal berkomunikasi secara teratur dengan staf, orang tua, siswa, dan masyarakat terkait. Ini disebabkan oleh kebanyakan kepala sekolah yang ada tidak dilengkapi dengan kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang memadai. Selain itu, promosi kepala sekolah belum didasarkan pada prestasi kerja, dan masih banyak berdasarkan urutan jenjang kepangkatan. Dengan kata lain, kemampuan kepala sekolah SD Negeri belum memenuhi persyaratan mutu untuk meningkatkan efektifitas manajemen sekolah. Lain halnya di sekolah swasta kebanyakan manajemennya lebih efektif dari sekolah-sekolah negeri, karena menerapkan pendidikan berbasis masyarakat. Di samping itu pemilihan kepala sekolah berdasarkan kemampuan manajerial dan kepemimpinannya.

Ketiga, pengelolaannya masih ter-*sentralistik*. Hal ini mengakibatkan kepala sekolah SD Negeri tidak bisa mengembangkan sekolah yang ada, sehingga mutu pendidikan dan siswanya berkurang. Sebab tidak mencerminkan karakteristik masyarakat setempat. Padahal pendidikan di dalam SD Negeri perlu juga mengadopsi kebutuhan dan budaya masyarakat setempat dalam rangka menarik perhatian dan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pendidikannya. Maka dari itulah perlu adanya *desentralisasi* pendidikan secara penuh untuk memaksimalkan dukungan masyarakat yang ada seperti yang sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah swasta. Karena menurut temuan ADB (Clark, 1998: 112-113 dalam Jalal & Supriyadi 2001) menyatakan bahwa hanya 8 % dari sekolah umum (sekolah pemerintah) dilaporkan mendapat bantuan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa sekolah negeri bukan merupakan sekolah milik masyarakat, dalam arti sebagai hasil upaya masyarakat yang memungkinkan anak-anak dapat memperoleh pendidikan yang memadai.

Untuk itulah pada tulisan ini akan mencermati fenomena di atas dengan menelaah signifikansi perencanaan dari *Grass Root*, penerapan pendidikan berbasis masyarakat dan disentralisasi pendidikan dalam rangka untuk mereformasi atau memberdayakan pendidikan dasar yang

ada. Namun sebelumnya akan dicermati bagaimana konsep pemberdayaan pendidikan itu sebenarnya.

A. Konsep Pemberdayaan Pendidikan

Pemberdayaan yang terkait dengan upaya sekolah adalah keberhasilan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan dilihat dari proses pendidikan dan hasil pendidikan (Depdikbud:1999). Proses pendidikan yang bermutu akan ditentukan oleh input, seperti : materi pelajaran, metodologi, sarana dan prasarana serta suasana sekolah yang kondusif.

Sebagai upaya pemberdayaan pendidikan, menurut Pavlov's (Bower G.H., 1981) dalam mengajar memerlukan kondisi khusus agar dapat merespon sikap perilaku yang diinginkan atau ada stimulan. Perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam proses pembelajaran dengan berbagai materi bidang studi memerlukan penguatan, agar proses perubahan itu dapat efektif. Penguatan itu dapat berupa penguatan positif dan penguatan negatif, sehingga kondisi yang khusus merupakan kebutuhan yang penting dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

Dalam mewujudkan suasana belajar yang kondusif tercermin pada keberlangsungan belajar di kelas dan di luar kelas. Pembelajaran di kelas tidak dapat lepas dengan peran guru dengan berbagai latar belakangnya yang memberikan pengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran. Pembelajaran di luar kelas seperti yang berlangsung di rumah banyak ditentukan oleh peran kedua orang tua.

Pembelajaran yang efektif dapat dilihat dari kemampuan siswa dan kemampuan guru dalam memperbaiki sikap siswa dalam proses pembelajaran (Squires, D.A., 1982). Pembelajaran yang baik dilihat dari kondisi kelas setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Penggunaan waktu belajar dapat secara optimal,
- b. Mulai pelajaran dan keberlangsungannya dapat tepat waktu,
- c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya,
- d. Memberikan penguatan pada pesan pembelajaran,
- e. Memberikan pujian bagi siswa yang memiliki prestise, dan,
- f. Memberikan penugasan kepada siswa.

Menurut penulis untuk menciptakan model pembelajaran yang efektif untuk sekolah dasar, salah satunya dapat menerapkan system pengajaran sentra. Model pendidikan ini, menitik beratkan pada pandangan seorang ahli pendidikan, Helen Parkhurst yang lahir tahun 1807 di Amerika. Pandangannya adalah kegiatan pengajaran harus disesuaikan dengan sifat dan keadaan individu yang mempunyai tempat dan irama perkembangan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Setiap anak akan maju dan berkembang sesuai dengan kapasitas kemampuannya masing-masing. Walaupun demikian kegiatan pengajaran harus memberikan

kemungkinan kepada murid untuk berinteraksi, bersosialisasi dan bekerja sama dengan murid lain dalam mengerjakan tugas tertentu secara mandiri. Pandangan ini mengisyaratkan bahwa Helen Parkhurst tidak hanya mementingkan aspek individu, tapi juga aspek sosial.

Untuk itu bentuk pengajaran ini merupakan keterpaduan antara bentuk klasikal dan bentuk individual. Sebagai gambaran pelaksanaan model ini, dapat diungkapkan sebagai berikut :

- a) **Ruangan kelas.** Ruang kelas dapat dimodifikasi menjadi kelas-kelas kecil, yang disebut ruangan vak atau sentra-sentra. Setiap ruangan vak atau sentra, terdiri atas satu bidang pengembangan. Ada sentra bahasa, sentra daya pikir, sentra daya cipta, sentra agama, sentra seni, sentra kemampuan motorik. Contohnya pada sentra bahasa terdapat bahan, alat-alat, serta sumber belajar seperti tape recorder, alat pendengar, kaset, alat peraga, gambar, dan sebagainya. Pada sentra daya pikir berisi bahan-bahan ajar seperti alat mengukur, manik-manik, lidi untuk menghitung, gambar-gambar, alat-alat geometris, alat-alat laboratorium atau majalah pengetahuan. Demikian pula pada sentra khusus seperti sentra balok, sentra air, sentra musik atau sentra bak pasir.
- b) **Guru.** Setiap guru harus mencintai dan menguasai bidang pengembangan masing-masing. Guru harus memberi penjelasan secara umum kepada murid-murid yang mengunjungi sentranya sesuai dengan tema yang dipelajari. Memberi pengarahan, mengawasi dan mempehatikan murid-murid ketika menggunakan alat-alat sesuai dengan materi yang dipelajarinya. Selanjutnya menanyakan kesulitan yang dialami murid-murid dalam mengerjakan materi tersebut. Selain dari itu guru sentra harus menguasai perkembangan setiap murid dalam mengerjakan berbagai tugas sehingga dapat mengikuti tempo dan irama perkembangan setiap murid dalam menguasai bahan-bahan pengajaran atau tugas perkembangannya.
- c) **Bahan dan Tugas.** Bahan pengajaran setiap sentra terdiri dari bahan minimal dan bahan tambahan. Bahan minimal yaitu bahan pengajaran yang berisi uraian perkembangan kemampuan minimal yang harus dikuasai setiap anak sesuai tingkat usianya. Bahan ini harus dikuasai anak dan merupakan target kemampuan minimal dalam mempeajari setiap sentra tertentu. Bila anak sudah menguasai bahan pengajaran minimal, dapat memperoleh bahan pengajaran tambahan, yang merupakan pengembangan atau pengayaan dari pengajaran minimal. Pengayaan ini diberikan bisa secara individu maupun kelompok pada anak yang menguasai bahan minimal pada satuan waktu yang relatif sama. Bahan pengayaan ini tentu saja disesuaikan dengan kondisi lingkungan, dengan demikian anak dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan sesuai dengan kenyataan dengan penuh tanggungjawab.

Bahan setiap sentra hendaknya terintegrasi dengan sentra lainnya. Di bawah ini merupakan contoh adanya integrasi antar sentra bidang pengembangan.

Tema : **Tanaman**

Sentra bahasa: **Dramatisasi "Fun Cooking"**

Sentra musik: **bernyanyi menanam jagung**

Sentra Aritmatika: **belanja dan menghitung sayur-sayuran**

Sentra air: **memelihara dan merawat tanaman**

- d) *Murid dan Tugasnya*. Setiap murid akan mendapat tugas dan penjelasan secara klasikal. Masing-masing murid dapat memilih sentra yang akan diikutinya. Ia bebas menentukan waktu dan menggunakan alat-alat untuk menyelesaikan tugasnya. Setiap murid tidak boleh mengerjakan tugas lain sebelum tugas yang dikerjakannya selesai. Untuk mengembangkan sosiabilitas, murid boleh mengerjakan tugas tertentu bersama-sama. Dengan cara ini murid akan mempunyai kesempatan bersosialisasi, bekerja sama, tolong menolong satu dengan lainnya. Murid yang dapat menyelesaikan suatu tugas atau sudah menguasai bahan minimal, ia dapat meminta tugas tambahan dengan memilih kegiatan lain yang digemarinya. Agar perbedaan setiap murid tidak terlalu jauh, guru dapat menetapkan bahan maksimal pada setiap pokok bahasan. Bila murid tidak dapat menyelesaikannya di sekolah, karena suatu hal, maka guru dapat memberi izin untuk menyelesaikannya di rumah.
- e) *Penilaian Kemajuan Murid*. Untuk menilai kemajuan murid digunakan tiga jenis kartu penilaian, yaitu kartu kemajuan individu, kartu rekapitulasi (mingguan, bulanan, catur wulan) dan kartu rekapitulasi laporan perkembangan setiap murid (Kartini, http://www.depdiknas.go.id/publikasi/Buletin/Pppg_Tertulis/08_2001/Model_Pembelajaran_Atraktif_TK.htm).

Selain di atas, sebagai upaya pemberdayaan pendidikan dasar dalam rangka peningkatan keefektifan sekolah, Peter Mortimore sebagaimana dikutip oleh Subarjo (2006:32-34) memberikan saran sebagai berikut: *Pertama*, Kepemimpinan kepala sekolah yang berorientasi pada tujuan yang jelas. Hal ini bisa terwujud jika kepala sekolah memahami kebutuhan-kebutuhan sekolah dan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. *Kedua*, keterlibatan wakil kepala sekolah. *Ketiga*, keterlibatan para guru. *Keempat*, konsistensi di antara guru-guru. *Kelima*, pembelajaran yang terstruktur. *Keenam*, pembelajaran yang menantang, *Ketujuh*, lingkungan yang berpusat pada kerja siswa, *Kedelapan*, pertemuan dengan fokus tertentu, *Kesembilan*, komunikasi maksimal antara guru dan murid, *Kesepuluh*, rekaman data, *Kesebelas*, keterlibatan orang tua murid dan iklim yang positif.

Dalam proses pemberdayaan pendidikan, terutama pendidikan dasar peran masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar tersebut. Jenis peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia, misalnya masyarakat memasukkan anaknya ke sekolah.
2. Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga.
3. Peran serta secara pasif, artinya menyetujui dan menerima apa yang diputuskan oleh pihak sekolah.
4. Peran serta melalui adanya konsultasi, misalnya orang tua datang ke sekolah utk berkonsultasi tentang masalah pembelajaran anaknya.
5. Peran serta dengan pelayanan, misalnya orang tua atau masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan di sekolah.
6. Peran serta sebagai pelaksana kegiatan yang didelegasikan, misalnya sekolah meminta masyarakat untuk memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan.
7. Peran serta dalam pengambilan keputusan, misalnya orang tua/masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan dan ikut dalam pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan sekolah (Depdiknas; 2005, Subarjo; 2006:106)

Akhirnya pada tahun-tahun mendatang, sekolah dasar kita wajib memberikan pengetahuan, ketrampilan, serta nilai-nilai yang relevan dengan tantangan kehidupan pada masa mendatang dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Hanya apabila anak-anak kita dibekali tiga hal ini, mereka akan mampu hidup dan memuliakan kehidupan dalam zaman globalisasi. Maka dari itu pemberdayaan pendidikan khususnya pendidikan dasar (SD/MI) jangan hanya di dekati dengan "birokratis" saja, tetapi harus di dekati dengan secara komprehensif sehingga akan dapat menghasilkan "out put" dan "out come" yang mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini di karenakan pendidikan dasar (SD/MI) mempunyai keistimewaan di antaranya : *Pertama*, adalah sebagai dasar selanjutnya. *Kedua*, bersifat permulaan secara sekolah untuk mendidik pikiran dan jiwa anak yang masih bersih dari pengaruh ideologi, nilai dan norma-norma yang menyesatkan.

B. Perencanaan dari *Grass Root*, Penerapan Pendidikan Berbasis Masyarakat dan Desentralisasi Pendidikan untuk pemberdayaan SD

Untuk mendesain kebijakan dan perencanaan pendidikan dasar, paling tidak sebaiknya menggunakan paradigma *social policy*, dimana dengan paradigma *social policy* ini desain kebijakan dan perencanaan dilakukan secara *bottom up*, yang berangkat dari *grass root*. Selanjutnya kebijakan yang akan dikeluarkan akan bersumber pada kehendak dan cita-

cita masyarakat banyak dan akan menghasilkan optimalisasi partisipasi masyarakat, sehingga Sekolah Dasar Negeri (SD/MI) yang ada tidak akan sampai tidak mempunyai murid.

Sebenarnya dalam konstruk pemikiran paradigma *social policy* ini Diknas dan Kanwil harus berperan sebagai katalisator dalam memobilisasi sumber daya pendidikan dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan dan memperluas peranan SD/MI Negeri yang ada. Kemudian dengan perencanaan dari *grass root* yang sesuai dengan paradigma *social policy* untuk ke depan mempunyai signifikansi terhadap pemberdayaan pendidikan dasar meliputi : *Pertama*, pendidikan dasar yang dilakukan oleh SD/MI Negeri akan lebih diberdayakan dari local/daerah, dan, *Kedua*, pendidikan dasar yang dilakukan oleh SD/MI Negeri akan dibangun berdasarkan kapasitas dan bersesuaian dengan perubahan-perubahan yang ada di daerah. sehingga pendidikan akan lebih bermakna dan mendapatkan bantuan dan partisipasi masyarakat.

Di samping itu, sistem pendidikan berbasis masyarakat kalau kita telusuri sebenarnya sudah dikembangkan di negara-negara lain, seperti di Sri Lanka yang dalam rangka pengembangan sekolah memperbolehkan anggota masyarakat lain dan alumni lain terlibat dan *Community Education Assosiation* di El Salvador atau *Village Education Committee* di Pakistan, yang dibentuk berdasarkan peraturan yang dirancang untuk mengurangi masalah disparitas pendidikan, serta *Life Long Education Center* di Thailand.

Setidaknya pendidikan berbasis masyarakat ini diperlukan, sedikitnya ada dua hal yang melatar belakanginya : *Pertama*, Wilayah yang luas dan lingkungan (sosial, budaya, dan geofisik) yang bervariasi, tidak memungkinkan adanya pendekatan pendidikan yang seragam, baik dalam tujuan khususnya maupun di dalam implementasinya. *Kedua*, Pendidikan yang bersifat kontekstual hanya dapat di ciptakan apabila situasi dan kondisi masyarakat yang sangat berbeda-beda di manfaatkan sepenuhnya sebagai unsur yang penting di dalam pengembangan pendidikan. (Renggani, <http://re-searchengines.com/1207renggani.html>)

Menurut Prof. Abdul Malik Fadjar, M.Sc ada indikasi positif dari penerapan konsep ini. Beliau menegaskan bahwa, pendidikan berbasis masyarakat mempunyai platform dasar penguatan sistem pendidikan di masyarakat dengan serangkaian agenda, yaitu: *Pertama*, memobilisasi sumber daya setempat dan dari luar guna meningkatkan peranan masyarakat untuk mengambil bagian yang lebih besar dalam perencanaan, implementasi, evaluasi penyelenggaraan pendidikan di semua jalur, jenjang, jenis dan satuan masyarakat. *Kedua*, menstimulasi perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rasa kepemilikan sekolah, dengan cara ikut bertanggung jawab melalui kemitraan, toleransi dan kesediaan menerima keragaman sosial-budaya. *Ketiga*, mendukung masyarakat untuk mengambil peran yang jelas dalam pendidikan, terutama orang tua dalam

paket kebijakan desentralisasi. *Keempat*, mendorong peran masyarakat dalam mengembangkan inovasi kelembagaan untuk melengkapi, mempertegas peran sekolah, meningkatkan mutu, dan relevansi, efisiensi manajemen pendidikan serta membuka kesempatan sekolah yang lebih besar demi program wajib belajar (Wajar) sembilan tahun pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (Ahmad El Chumaedy, <http://www.pendidikan.net/artikel.html>).

Sistem pendidikan berbasis masyarakat ini menurut hemat penulis menerapkan perubahan masyarakat yang dimulai dari pemahaman situasi dari Gagne dan analisis pengalaman dari Bruner serta di rekonstruksi menjadi konsep yang kokoh dari Ausabel. Dimana model pengubahannya dapat di bagi empat : *Pertama*, model modifikasi perilaku. Dengan model ini partisipasi masyarakat membangun gedung sekolah dasar akan lebih maksimal. *Kedua*, Model Interaksi Sosial. Dengan model ini akan membawa masyarakat dalam aksi bersama dalam proses pendidikan di sekolah dasar. *Ketiga*, model *personal humanistik*. Dengan model ini akan memberangkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan sekolah dasar lewat kesadaran dirinya. Dan, *Keempat*, pengolahan informasi. Dengan model ini pendidikan dasar akan lebih diberdayakan lewat *grass root*.

Signifikansi dari penerapan pendidikan berbasis masyarakat untuk ke depan dalam peberdayaan pendidikan dasar paling tidak akan mampu : a) membuat SD/MI Negeri lebih responsif dan akuntabel kepada masyarakat dengan lebih menitikberatkan komponen ketrampilan, dan muatan lokal, b) mengembangkan manajemen berbasis sekolah yang inovatif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, c) merangsang partisipasi dalam mendukung program wajib belajar, dan d) mendorong terbentuknya hubungan lebih erat antara sekolah dengan masyarakat dalam mengembangkan SD/MI Negeri.

Selain soslusi di atas, desentralisasi pendidikan dasar perlu diterapkan secara maksimal. Kalau menengok ke Meksiko, sampai pada tahun 1978 pemerintahan Meksiko sangatlah sentralistik. Di negara bagian yang miskin kurang dari 20 % yang dapat memperoleh pendidikan. Namun mulai pada tahun 1978 diadakanlah desentralisasi. Hal ini merentang dari penyusunan anggaran sampai pengelolaah sekolah, serta penjabaran kurikulum dan pemerintah hanya *menyusun Core Curriculum*-nya saja. Desentralisasi ini kemudian memacu pertambahan murid, terutama di daerah rural.

Acuan dari berbagai kepustakaan sebenarnya mendukung adanya disentralisasi pendidikan atau otonomi pendidikan. Rizvi dan Lingard (1992) menyatakan bahwa otonomi pendidikan (sekolah) akan dapat menyertakan masyarakat dalam melaksanakan keputusan-keputusan sekolah. Sudut pandang lain dikemukakan oleh Peach (1994) yang

disepakati oleh Cranston (1993) dan Rizvi (1994). Bagi mereka, yang utama dari otonomi pendidikan (sekolah) adalah peningkatan manajemen sekolah untuk membebaskan pengalokasian sumber daya dari kepentingan yang bersifat administratif ke kepentingan yang lebih bersifat edukatif (Jalal & Supriyadi 2001: 159).

Sementara itu Sidi (2000) mengungkapkan landasan dalam rekonstruksi pendidikan menuju desentralisasi meliputi: *Pertama, Mutu pendidikan*. Upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan, yaitu melalui consensus nasional antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat. Standar kompetensi yang mungkin akan berbeda antar sekolah atau antar daerah akan menghasilkan standar kompetensi nasional dalam tingkatan standar minimal normal (mainstream), dan unggulan; *Kedua, Efisiensi*. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan mengarah pada pengelolaan pendidikan berbasis sekolah, dengan memberi kepercayaan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan; *Ketiga, Relevansi pendidikan*. Peningkatan relevansi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat. Peningkatan peran serta orang tua dan masyarakat pada level kebijakan (pengambil keputusan) dan level operasional melalui komite (dewan) sekolah. Komite ini terdiri atas kepala sekolah, guru senior, wakil orang tua, tokoh masyarakat, dan perwakilan siswa. Peran komite sekolah meliputi perencanaan, implementasi, monitoring, serta evaluasi program kerja sekolah; *Keempat, Pemerataan kesempatan pendidikan*. Pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang berkeadilan. Hal ini berkenaan dengan penerapan formula pembiayaan pendidikan yang adil dan transparan, upaya pemerataan mutu pendidikan dengan adanya standar kompetensi minimal, pemerataan pelayanan pendidikan bagi siswa pada semua lapisan masyarakat. (Isbandi, <http://icmimudabanten.org/jurnal/?p=47>)

Pola disentralisasi pendidikan ini akan menguntungkan semua pihak dalam rangka pengembangan sekolah dasar. Hal ini karena akan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam iklim yang *Laissez Faire*. Signifikansi dari desentralisasi pendidikan yang ada untuk pemberdayaan pendidikan dasar adalah; *Pertama*, paling tidak akan diubahnya anggaran pendidikan menjadi 10 % untuk pengelolaan dan 40 % untuk sekolah, sedang yang 50 % untuk fungsi pemerataan bagi yang belum memperoleh alokasi bantuan atau subsidi, *Kedua*, akan adanya perampingan kurikulum pendidikan dasar dan hanya disajikan dalam *frame work*-nya saja, dan *Ketiga*, pendidikan dasar akan terdorong mengadakan reformasi secara *pedagogik* secara menyeluruh seperti di Selandia baru.

C. Kesimpulan

Upaya pemberdayaan pendidikan itu meliputi semua aspek yang akan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada, baik dari segi proses belajar mengajarnya, kurikulumnya, manajemennya dan lain sebagainya. Di sinilah masih memerlukan kerja keras dari semua pihak baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraannya.

Pendidikan dasar terutama pendidikan dasar Negeri yang mempunyai arti penting untuk keberlangsungan pendidikan anak didik setelah di cermati mempunyai banyak kelemahan-kelamahan yang ada. Untuk itulah paling tidak pemberdayaan pendidikan dasar tersebut bisa dilakukan dengan menerapkan perencanaan dari *Grass Root*, pendidikan berbasis masyarakat dan desentralisasi pendidikan secara optimal. Hal ini karena setelah dianalisis mempunyai signifikansi yang jelas seperti yang diuraikan di atas. Yang pada akhirnya akan menjadi lembaga pendidikan yang tetap "*survive*" untuk masa yang akan datang.

D. Daftar Pustaka

- Abbas, Hafidz, dkk, 2001, *Pendidikan Berbasis Masyarakat*, dalam Jalal, F., & Supriyadi, D., *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otda*, Yogyakarta: Adi Cita.
- Ahmad El Chumaedy, *Menyegarkan Kembali Sisdiknas; Untuk Membangun Civil Society dan Demokrasi*,
<http://www.pendidikan.net/artikel.html>, diakses pada tanggal 13 April 2008, jam 07.00 WIB.
- Ahmadi, Abu, (1991), *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Bower, Gordon H. & Hilgard Ernest R, (1981), *Theories of Learning*, USA : Prentice Hall. Inc Englewood Cliffs. N. J.
- Depdikbud. (1999), *Dampak Krisis Ekonomi pada Pendidikan Dasar*, Laporan Penelitian, Jakarta : Depdikbud.
- Isbandi, *Desentralisasi Pendidikan*,
<http://icmimudabanten.org/jurnal/?p=47>, diakses pada tanggal 13 April 2008, jam 05.30 WIB.
- Jalal, F., & Supriyadi, D., 2001, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otda*, Yogyakarta: Adi Cita.
- Kartini, Model Pembelajaran Atraktif di Taman Kanak-Kanak,
http://www.depdiknas.go.id/publikasi/Buletin/Pppg_Tertulis/08_2001/Model_Pembelajaran_Atraktif_TK.htm.
- Muhadjir, Noeng, 2000, *Kebijakan dan Perencanaan Sosial Pengembangan SDM Telaah Cross Disipline*, Yogyakarta: Rake Sarasin.

- , 2001, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Telaah Cross Disipline*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Rizvi, F & Lingard, B.. 1992, *A Replay to Barcan: Theorizing the Ambiguities of devolution*, Discourses vol. 13. 1, 111-123, dalam Jalal, F., & Supriyadi, D., 2001, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi*, Yogyakarta: Adi Cita.
- Renggani, *Pendidikan Berbasis Masyarakat Menuju Otonomi Daerah Kaltim*, <http://re-searchengines.com/1207renggani.html>, diakses pada tanggal 13 April 2008, jam 06.00 WIB.
- Squires, david, A, dkk., (1983), *Effective School and Classrooms : A Research Based Perspective*, North Washington : Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD).